



- ▶ Laporan Terkini ... hal 4
Saatnya Mengukur Dampak
- ▶ Laporan Lapangan ... hal 7
Kisah Kelompok Daur Ulang
RW VII Kelurahan Hamadi,
Jayapura Selatan
- ▶ Laporan Lapangan ... hal 8
Indonesia Sukses Bawakan
Progres WiSE di Dubai

Newsletter AMPL

Media Informasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan



Menuju MDGs 2015 Dimana Kita Sekarang ?



Dimana posisi kita sekarang, mungkin satu pertanyaan tersebut kerap muncul jika kita membicarakan pencapaian pembangunan air minum dan sanitasi layak di Indonesia. Terlebih tahun 2012 merupakan tengah waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Artinya, dengan semakin dekatnya tenggat waktu *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015, kejelasan posisi kita saat ini dapat menjadi gambaran untuk

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi di beberapa tahun ke depan.

Pada akhir tahun 2011 lalu, BPS mengeluarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2010 yang salah satunya mengenai hasil survey rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan sarana sanitasi layak. Dari hasil tersebut, pada tahun 2010 terdapat 44,19% proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak. ... hal 2

Program *Water Safety Plan* Indonesia Segera Terwujud



Pengembangan dan implementasi konsep program *Water Safety Plan* (WSP) yang dilakukan Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas segera terwujud. Pematangan program WSP Indonesia ini untuk kali ketiga dilakukan di Bogor, Jawa Barat, 13-14 Febuari 2012. Selama tahun 2011 telah diselenggarakan tiga kali lokakarya untuk membahas WSP, yaitu: inisiasi WSP lokakarya dihadiri oleh *stakeholder* yang relevan; Lokakarya pemaparan konsep WSP pada tanggal 20 September 2011 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta; serta pemaparan konsep dan contoh-contoh pelaksanaan WSP di Indonesia ... hal 3

Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 47,71%.

Penurunan ini terjadi antara lain karena semakin meningkatnya penggunaan air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum rumah tangga. Di lain pihak, upaya yang ada belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan perkotaan. Terlebih minimnya dana operasional dan pemeliharaan mengakibatkan banyak sarana dan prasarana menjadi rusak ataupun tidak berfungsi optimal. Untuk mencapai target MDGs 2015 yaitu sebesar 68,87% dibutuhkan penambahan akses air minum layak bagi 67 juta jiwa penduduk atau sekitar 13 juta jiwa penduduk setiap

tahunnya.

Lain halnya dengan sanitasi, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sarana sanitasi layak justru meningkat dari 51,19% pada tahun 2009 menjadi 55,53% pada tahun 2010.

Walaupun terjadi peningkatan terhadap akses sanitasi layak, tetap diperlukan upaya luar biasa dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi khususnya untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi yang dapat mencegah kontak antara tinja dengan manusia, tidak mencemari lingkungan dan menjamin privasi pengguna. Selain itu, kampanye dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus semakin

digalakkan karena permasalahan utama sanitasi terletak pada kesadaran dan perilaku masyarakat. Diperlukan penambahan akses sebesar 6,88% untuk mencapai target MDGs 2015 sebesar 62,41% dan upaya luar biasa untuk menciptakan kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS).

Akhirnya, semua gambaran kondisi tersebut menyiratkan kepada kita bahwa masih banyak upaya yang perlu kita tingkatkan untuk bahu membahu membenahi kondisi air minum dan sanitasi demi Indonesia yang lebih baik. **Nur Aisyah Nasution - Ditperkim Bappenas**



dalam rangkaian acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional pada tanggal 12 Oktober 2011 yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta pusat dan daerah.

Serangkaian pertemuan dengan pelaku utama pada ketiga acara tersebut telah menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yaitu WSP perlu dilakukan dan dikembangkan dalam konteks WSP Indonesia. Konsep ini nantinya dapat diimplementasikan dan dapat menjawab permasalahan kuantitas, kontinuitas, kualitas dan keterjangkauan pelayanan air (4K). Selain itu, konsep implementasi WSP tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pengamanan pada 4 lokus yaitu WSP sumber, operator, komunitas dan konsumen.

Beberapa agenda acara antara lain presentasi mengenai Konsep Awal WSP Indonesia Adopsi WHO. Agenda lainnya adalah formulasi dan Penyetujuan *Road Map* WSP Indonesia; presentasi Perspektif Implementasi WSP di Indonesia; Presentasi Konsep Uji Coba WSP Indonesia; serta diskusi, klarifikasi dan rencana tindak lanjut.

Selain diikuti oleh peserta dari kementerian anggota Pokja AMPL Nasional, PERPAMSI, BPP-SPAM, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan PDAM dan SKPD yaitu dari Bappeda Provinsi Jawa Barat - BPLHD, Bappeda Kota Bandung, Bappeda Kabupaten Bandung, PDAM Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor, Bappeda dan PDAM Kota Banjarmasin, serta PDAM Kota Palembang.

Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas menyampaikan dalam sambutannya bahwa urgensi pengembangan konsep WSP di Indonesia diilhami pada saat mengikuti lokakarya WSP di Manila. Harapannya, pada lokakarya ini dapat disepakati mengenai fokus konsep WSP Indonesia.

Konsep WSP yang selanjutnya disebut Rencana Pengamanan Air (RPA) dipaparkan secara bergantian oleh Eko Wiji Purwanto selaku Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Dit. Perkim Bappenas dilanjutkan oleh Winarko Hadi dari Waspola Facility yang bertindak sebagai tim penyusun konsep RPA.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada tim pembahas yang terdiri dari Basah Hernowo - Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas; Dani Sutjiono - Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Kementerian Pekerjaan Umum; serta Wilfred R. Purba - Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan pertama, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas menyampaikan tanggapannya berupa konsep *ecological water purifier*. Konsep ini menjelaskan bahwa ekosistem yang sehat menyediakan berbagai jasa lingkungan, salah satunya adalah jasa *Water Purification* (Pemurnian atau Penjernihan Air). Polutan seperti metal, virus, *excess* nutrisi dan sedimen diproses dan disaring saat air melalui hutan, lahan basah, dan riparian area.

Proses Pemurnian dan Penjernihan Air melalui ekosistem jauh lebih murah (*cost effective*). Sebagai contoh, daripada membangun fasilitas *water treatment* senilai US 8 billion, Pemerintah Negara Bagian New York melakukan restorasi *watershed* senilai US 1 billion untuk menyediakan air minum bagi Kota New York. Harga jual air bersih 2L/hari seharga 50 sen.

Pada kesempatan berikutnya, Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, menyampaikan bahwa jika permasalahan yang ada di hulu sungai (WSP Sumber) bisa dibenahi maka permasalahan yang ada di hilir bisa lebih terminimalisasi. Direktorat PAM menyatakan dukungannya melalui alokasi dana di tahun 2012 untuk pengembangan konsep WSP bagi operator. Peran dari WSP ini diharapkan dapat memberikan input terhadap PDAM selaku operator penyedia air mengenai manajemen resiko serta manajemen yang baik.

Hari kedua pelaksanaan lokakarya dilanjutkan dengan pemaparan oleh Arief Sudrajat, dosen Teknik Lingkungan ITB yang menyampaikan materi tentang "Perspektif Implementasi WSP di Indonesia". Berdasarkan pengalamannya ketika bertindak sebagai tenaga ahli pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang berbuah menjadi PERDA Provinsi Jawa Barat No. 3 tahun 2001, bahwa RPA akan berhasil apabila didukung oleh perangkat peraturan serta SDM yang memadai.

Selain Sudrajat, BPLHD Provinsi Jawa Barat, BPP-SPAM yang diwakili oleh Budi Sutjahjo, dan PERPAMSI yang diwakili oleh Agus Sunara secara bergantian memberikan paparannya terkait konsep RPA.

Lokakarya ini ditutup dengan kesepakatan Pokja AMPL Nasional akan memfasilitasi pertemuan untuk menentukan Tim Teknis RPA yang akan mengawal keseharian kegiatan ini.

Adhitya Wirayasa - Sekt. Pokja AMPL Nasional



foto: Eko

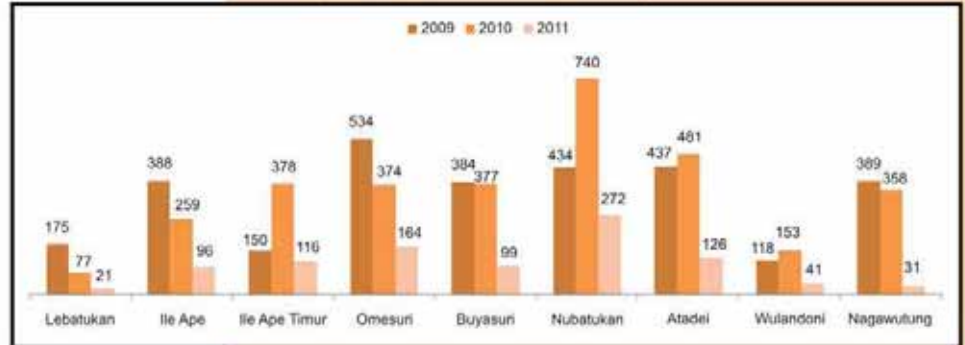
Saatnya Mengukur Dampak

Dalam perspektif pembangunan sektor kesehatan, intervensi program STBM pada wilayah pedesaan di Indonesia diharapkan dapat mengurangi kasus diare yang terjadi di tengah masyarakat. Diare merupakan salah satu *water-borne disease* yang dapat menyebabkan kematian balita dan orang dewasa. Kejadian diare dapat ditekan terutama melalui perubahan perilaku dalam kebiasaan buang air besar, cuci tangan pakai sabun, serta peningkatan akses dan pengelolaan air minum. Studi WHO yang dilaksanakan empat tahun silam menyatakan bahwa kombinasi dari keempatnya dapat menekan diare hingga 94%. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang dicanangkannya program STBM di Indonesia.

Pertanyaannya saat ini adalah sudah sejauh mana program STBM yang kita implementasikan berdampak positif pada pengurangan penyakit diare?

Meskipun masih terdapat debat panjang mengenai keterkaitan antara peningkatan akses sanitasi dan penurunan diare, Plan Indonesia saat

Grafik Kejadian Penyakit Diare Pada Wilayah Kerja Plan Indonesia di Kabupaten Lembata (Sumber: Dinkes Kab. Lembata)



ini mencoba untuk membuktikan bahwa keterkaitan itu ada walaupun dalam skala mikro. Mengambil contoh dari implementasi 5 pilar STBM di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), Plan Indonesia telah melihat adanya penurunan kasus diare pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi sasaran. Dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi akumulasi penurunan diare sekitar 27% di Kabupaten TTS dan 34% di Kabupaten TTU. Untuk tahun-tahun kedepannya perlu dilihat lagi kecenderungan kasus penyakit diare pada kedua wilayah kerja ini untuk mengetahui keberlanjutan dampak program STBM.

Hasil yang lebih menggembirakan adalah dampak penurunan diare pada wilayah kerja Plan Indonesia di Kabupaten Lembata. Implementasi program STBM di Lembata dimulai sejak awal Tahun 2009 pada 9 kecamatan. Implementasi 5 pilar STBM, ditambah dengan 1 pilar lain

yaitu pengelolaan kotoran ternak, telah berdampak positif pada pengurangan diare. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa terjadi penurunan diare secara signifikan pada tahun 2011 di seluruh kecamatan wilayah intervensi program STBM (lihat grafik). Pada Kecamatan Nagawutung penurunan diare bahkan mencapai 91%, dan pada Kecamatan Nubatukan sebesar 63%.

Harus diakui memang terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara penerapan STBM dan penurunan diare. Namun yang jelas, fakta dari Kabupaten Lembata, TTS, dan TTU telah mengindikasikan adanya keterkaitan antar keduanya dan saatnya kita perlu lebih lanjut untuk membuktikannya. Setidaknya kita perlu melihat *data time series* selama 4 tahun berturut-turut untuk memastikan bahwa penerapan STBM akan berdampak positif pada penurunan diare. Oleh karena itu, diserukan bagi seluruh pelaku STBM di Indonesia: saatnya mengukur dampak! **Tian & Wahyu – Plan Indonesia**



Tippy Tap (dengan saluran dan lubang resapan air dibawahnya), hasil buatan masyarakat sebagai sarana CTPS yang dipromosikan melalui program STBM
foto: Plan Indonesia

Lokakarya Penjaringan Minat Kabupaten/Kota PPSP 2013

Pada tanggal 26-28 Februari 2012 di Hotel Aston Cengkareng, diadakan Lokakarya Nasional (Loknas) Penjaringan Minat PPSP 2013 dan 2014. Undangan terdiri dari perwakilan Pokja di 29 provinsi, yang merupakan provinsi dengan kabupaten/kota rawan sanitasi yang belum mengikuti program PPSP. Sebanyak 80 orang dari perwakilan 22 provinsi yang hadir terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU/Cipta Karya dan Satker PPLP.

Hasil dari Loknas ini adalah rencana tidak lanjut (RTL) provinsi untuk melakukan penjaringan minat di wilayahnya. Dari hasil rekap sementara, dari RTL 20 provinsi, sebanyak 121 kabupaten/kota akan ditargetkan untuk mengikuti program PPSP di 2013 dan sebanyak 17 kabupaten/kota di tahun 2014. Dari RTL tersebut juga diketahui bahwa penjaringan minat dan sosialisasi ke kabupaten/kota akan sebagian besar dilakukan pada akhir bulan Maret/awal April 2012. Provinsi diharapkan dapat menyampaikan surat minat kabupaten/ kotanya



foto: sanitasi.or.id

paling lambat bulan Mei 2012.

Pada akhir acara, Zainal Nampira, Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Direktorat P2PL Kementerian Kesehatan, menyampaikan tanggapannya terhadap peranan penting provinsi dalam penjaringan minat secara khusus. "Provinsi berada di garda terdepan dalam menentukan kabupaten/kota di daerahnya yang layak diusulkan sebagai peserta PPSP 2013. Provinsi berwenang melakukan verifikasi atas kesiapan daerah sekaligus memastikan kabupaten/kota yang berminat mengirimkan surat minatnya," jelas Zainal Nampira.

Perwakilan Pokja dari 20 provinsi dalam kesempatan ini juga

menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaan PPSP secara umum. Beberapa pembelajaran yang didapatkan adalah Pokja di Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan tanpa honorarium dan beberapa pokja provinsi telah mengadakan penjaringan minat seperti Pokja Provinsi Kalimantan Barat. Masukan lain yang didapat juga seperti pelaksanaan tahapan buku putih dan SSK serta MPSS yang kemungkinan dilakukan dalam satu tahun, pembinaan pokja provinsi oleh pusat, serta evaluasi pelaksanaan PPSP terkait dampak, seperti dampak kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. **Aldy Mardikanto - Ditperkim Bappenas**

PPSP Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman

Awal Tahun, Berbagai Program Adakan Kegiatan ToT

Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan fasilitator air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten/kota, pemerintah pusat melalui beberapa program menyelenggarakan ToT atau *Training of Trainer*. Beberapa program yang menyelenggarakan ToT ini adalah Program PPSP (7-10/02), Pamsimas (6-11/02) dan STBM (15-26/02). Semuanya bertujuan untuk mempersiapkan pasukan pengajar yang siap dalam membawakan materi yang tepat serta tanggap dalam segala situasi di lapangan.

ToT PPSP dan Sosialisasi Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Dalam ToT Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan di Hotel Acacia Jakarta, 7-10 Februari lalu, 23 anggota PMU-PIU PPSP belajar memahami pengelolaan program PPSP sesuai perkembangan terkini dan memahami tata kelola pemerintahan daerah serta koordinasi antar SKPD. Topik pelatihan dalam ToT kali ini dikaitkan dengan lima isu krusial yakni (1) konsep dan substansi PPSP; (2) metodologi dan mekanisme pelaksanaan kerja di setiap tahapan PPSP; (3) internalisasi strategi sanitasi ke dalam dokumen perencanaan daerah; (4) upaya membangun komitmen penganggaran pembangunan sanitasi di semua level pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); (5) model pendekatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan hasil pencapaian program di kabupaten/kota dan provinsi.

Direktur Penataan Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dadang Sumantri, pada pembukaan menyampaikan ToT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota PMU dan PIU dalam pelaksanaan kegiatan PPSP di 2012. "Peserta diharapkan mampu memahami aspek penganggaran daerah sesuai Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah agar mereka mampu memahami konsep perencanaan strategis dan proses kabupaten/kota dalam PPSP serta penilaian kualitas proses dan produknya," jelas Dadang.

ToT Fasilitator Provinsi untuk Keberlanjutan Pamsimas

Dalam pelatihan *Training for Trainer* yang diselenggarakan program Pamsimas di Hotel Sentral, Jakarta 6-11 Februari yang lalu, para tenaga ahli tingkat provinsi dari PMAC (*Provincial Management Advorsort Consultant*) dari berbagai bidang seperti pengembangan kapasitas, teknis, kesehatan dan manajemen keuangan, dilatih untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam memfasilitasi pelatihan bagi TFM (Tenaga Fasilitator Masyarakat) reguler tahun 2012.

Ketua CPMU Program PAMSIMAS, Alex A. Chalik dalam sambutan pembukaan mengatakan, ToT ini sangat penting karena merupakan bagian dari upaya agar kegiatan PAMSIMAS makin mantap. "Para peserta harus mendapat penyegaran dan penyeragaman dalam informasi, pengetahuan, maupun hal-hal baru yang memperkuat semangat dalam mengemban program PAMSIMAS tahun 2012 ini," ungkap Ketua CPMU.

TOT Fasilitasi Teknis STBM

Selain ToT PPSP dan Pamsimas, STBM juga menyelenggarakan pelatihan fasilitator. Diselenggarakan di Hotel Grand Cikarang, sebanyak 44 peserta mengikuti pelatihan fasilitator STBM di tanggal 15-18 Februari yang membahas fasilitasi teknis STBM, pelatihan dilanjutkan dari tanggal 20-26 Februari 2012 untuk membahas fasilitasi tingkat lanjut STBM. Mayoritas peserta berasal dari Dinas Kesehatan, Badan Teknik Kesehatan Lingkungan dan Dinas Promosi Kesehatan propinsi dan beberapa mitra yang bergerak dalam STBM seperti World Vision Indonesia, Plan Indonesia, Simavi, CD Bethesda, dan Yayasan Rumsram.

Direktur Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Wilfred Purba, menyampaikan tujuan ToT ini adalah untuk meningkatkan kapasitas calon fasilitator STBM tingkat nasional dan provinsi yang mampu memfasilitasi, melatih dan memberikan materi-materi tentang STBM secara terpadu. "Target pemerintah, hingga 2014 ada 20.000 desa yang mengimplementasikan STBM. Sampai saat ini baru 6.300 desa yang sudah mendapat pemicuan. Tentu saja kebutuhan fasilitator dari berbagai level menjadi kebutuhan mutlak," kata Wilfred dalam pembukaan pelatihan tersebut.

disarikan dari tulisan Mujiyanto (PPSP), Suhardjo (TA Media Komunikasi CMAC), Lisa (Sekt. Pokja AMPL Nasional)



Kunjungan Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam ToT
foto: Rumsram

Belajar dari Kegigihan Para Ibu

Kisah Kelompok Daur Ulang RW VII Kelurahan Hamadi, Jayapura Selatan

Siang itu, sekumpulan Ibu-Ibu tampak asyik bercengkrama sambil tangan mereka sesekali sibuk melipat dan mengerjakan sesuatu. Tak sadar mereka, sedari tadi rombongan dari Pokja AMPL Kota Jayapura yang sengaja berkunjung tengah memperhatikan dengan seksama. Ibu-ibu ini merupakan anggota kelompok daur ulang RW 7 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Hampir setiap siang mereka berkumpul untuk sama-sama mengolah sampah organik dan nonorganik yang terkumpul dari kelurahan setempat.

Selama ini sampah-sampah yang terkumpul di RW 7 dan beberapa RW dari Kelurahan Hamadi dipilah sebagian untuk diolah kembali oleh Kelompok Daur Ulang RW VII Hamadi ini. Sampah organik biasanya mereka arahkan untuk mendukung pengembangbiakan jamur tiram, sementara sampah nonorganik diolah secara kreatif menjadi aksesoris rumah tangga seperti tas, tempat tisu, dompet, dan sebagainya.

Kelompok daur ulang ini sebagian besar beranggotakan ibu-ibu dari persekutuan wanita gereja dan pengajian masjid. Saat berbincang dengan beberapa fasilitator dan anggota rombongan dari Pokja AMPL Kota Jayapura, tidak canggung mereka mengungkapkan permasalahan sekaligus harapan tentang keberlanjutan usaha mereka.

"Keterbatasan lahan adalah masalah utama untuk usaha jamur tiram, kendala lainnya biasanya karena tingginya curah hujan yang mengancam panen," jelas Rosdiana Kadir, salah seorang anggota kelompok ini. "Sementara itu, usaha kerajinan tangan kami terbentur di pemasaran. Sedih juga sudah dibuat lama-lama, tapi susah lakunya," jelas Rosdiana sambil tersenyum.

Tas dari sampah deterjen salah satu contohnya. Untuk bentuk sederhana, cukup memerlukan 4-6 sampah plastik dari bahan yang sama dan dijahit dalam beberapa jam. Namun untuk model yang lebih rumit satu tas bisa memerlukan 300 sampah plastik dari merek yang sama, dan dianyam dalam waktu 3-4 hari. Untuk membudidayakan jamur tiram dari sampah organik, juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, yaitu 1-2 bulan.

Menanggapi cerita tersebut, Sekretaris Pokja AMPL Kota Jayapura, Selfina Kbarek, mengatakan akan mengupayakan pemasarannya kepada Pemerintah Kota Jayapura melalui forum-forum dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pokja AMPL Kota Jayapura. "Kreatifitas dan komitmen kan mahal harganya. Kelompok seperti ini harus didukung oleh pemerintah kota, kalau tidak bisa mati," kata Selfina.

Berkumpul dan berkreasi agaknya telah menjadi kegemaran ibu-ibu Kelompok Daur Ulang RW 7 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Sebagai rekomendasi bagi keberlangsungan kegiatan daur ulang tersebut, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program WES UNICEF Kota Jayapura Rosna Nurhayun mengusulkan agar kelompok daur ulang menyusun struktur organisasi dengan pembagian tanggung jawab yang disepakati bersama. "Kegiatan ini sangat positif, lebih baik apabila didukung dengan organisasi yang lebih matang. Kegigihan ibu-ibu kelompok daur ulang RW 7 ini patut ditiru," pungkas Rosna. **Iman Santoso - Fasilitator Kelembagaan Pokja AMPL Kota Jayapura**



Ibu-ibu Kelompok Daur Ulang RW 7 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dan hasil kerajinannya

foto: Iman



Indonesia Sukses Bawakan Progres WiSE di Dubai

Sanitasi Sekolah yang diusung dalam program WiSE (*Water, Sanitation, Hygiene in Support of School Empowerment*) sukses dipresentasikan delegasi Indonesia dihadapan para peserta *Dubai Cares Wash in School Meeting* yang berlangsung di Dubai, 20-21 Februari kemarin. Acara yang disponsori oleh Dubai Cares ini selain untuk mengetahui kemajuan terkini program WiSE di Indonesia yang disponsori oleh

Dubai Cares, tetapi juga merupakan ajang pembelajaran bagi dua negara lain (Sierra Leone dan Mali) yang juga menerapkan program sanitasi sekolah di negara mereka. Di awal tahun 2011 kemarin, Dubai Cares memberikan hibah sebesar 5,5 juta dolar untuk mensukseskan pelaksanaan program WiSE di Indonesia.

Perwakilan delegasi Indonesia, Maraita Listyasari dari Bappenas, Ibrahim Bafadal dan Elvira dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Claire Quillet dari Unicef, Arie Infanto dari Care Indonesia dan Silverius Tasman dari Save The Children dalam kesempatan tersebut secara bergantian menyampaikan pembelajaran dari Indonesia dalam upaya memberdayakan sekolah melalui kegiatan WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*). Kebijakan nasional di sektor pendidikan serta air minum dan sanitasi hingga kisah sukses di empat provinsi yang melaksanakan program sanitasi sekolah, Papua, Papua Barat, NTT dan Sulawesi Selatan, dipaparkan secara mendalam oleh para delegasi.

“Perwakilan Indonesia yakin bahwa mutu pendidikan akan meningkat melalui peningkatan kehadiran murid di sekolah, yang salah satunya terkait dengan tersedianya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi layak,” ungkap Maraita Listyasari. Program sanitasi sekolah juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi anak-anak sehingga dapat ditularkan di keluarga maupun lingkungan masyarakat. Untuk itu, program sanitasi sekolah diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target MDGs Sanitasi. **Maraita Listyasari - Ditperkim Bappenas**

Untuk informasi lebih lengkap dapat langsung dilihat di <http://www.ampl.or.id> atau <http://digilib-ampl.net>

Anda juga dapat bergabung dalam mills AMPL [milis_ampl@yahoo.com]

Kami juga menerima tulisan berita yang terkait AMPL, kirimkan tulisan Anda ke pokja@ampl.or.id atau redaksi@digilib-ampl.net

Tulisan yang terpilih akan di muat dalam newsletter cetak tiap bulannya.

Publikasi

BUKU

- Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan 2011
- Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia
- Jejak dan Langkah Pokja AMPL Memoar Periode 2002-2010
- Katalog Media Informasi AMPL

LAPORAN

- *Draft Final Report: Community Water Services and Health (CWSHP)* Kalimantan Barat
- Laporan Kegiatan Program Duta Air & Sanitasi Juli 2009-Mei 2010
- Laporan Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD):* Registrasi Cakupan Air Minum Penyehatan Lingkungan di Kecamatan Sungailiat, Riau Silip, Belinyu dan Puding Besar, Hotel Novilla, 07-08 Juni 2011
- Laporan Pelaksanaan *Workshop* Penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Strategy Percepatan Pencapaian Sasaran Pembangunan AMPL di NTB Tanggal 20 sd 22 Oktober 2010
- Laporan Pendahuluan: Modul Teknologi Tepat Guna Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
- Laporan Tahunan 2009 Tropenbos International Indonesia
- Laporan Tahunan Sekretariat Bersama STBM-Pokja AMPL, Tahun 2010
- Ringkasan Laporan: Studi Analisis Pelayanan Sektor AMPL di Kabupaten di Era Desentralisasi

Agenda AMPL Maret 2012

- Rapat Koordinasi Kegiatan Komunikasi dan Advokasi Pokja AMPL Nasional (Jakarta-14/03/12)
- Konsultasi Regional Kementerian PU Wilayah Timur (Kupang, 14-15/03/12)
- Rapat Jejaring AMPL (Jakarta - 22/03/12)
- Pelatihan Teknis Pemucuan dan Pengelolaan Bank Sampah – Kementerian Pekerjaan Umum
- Konsinyasi Perencanaan dan Implementasi Strategi Advokasi Nasional
- *Training of Trainers* untuk Pelatihan TFM Keberlanjutan - Pamsimas
- *Workshop* Penyusunan Rencana Aksi – Institusionalisasi Perluasan dan Pengarusutamaan Pamsimas di Provinsi dan Kabupaten/Kota - Pamsimas Kemdagri
- Lokakarya Sosialisasi Sistem Movev dan Perangkat *Helpdesk* Program AMPL – PPSP
- *Road Map* Sanitasi Sekolah